



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUSTINA DWI WIJAYANTI
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN FARMAKOLOGI
3. NHK : 818577

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/50 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/75 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 231 m2/180 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **722.000.000**

1. MOBIL, FORTUNER MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOTOR, VARIO A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOBIL, HONDA SEDAN Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERTHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **65.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **3.937.000.000**

III. HUTANG **Rp.** **900.000.000**



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.037.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.